BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Dewasa ini perekonomian semakin modern. Hal ini dilihat dari semakin terpisahnya manajemen dan pengelolaan perusahaan.. Senada dengan teori *agency*, pada awalanya terjadi pemisahan antara kepemilikan perusahaan dengan yang menjalankan perusahaan atau tenaga professional dalam hal ini seperti manajer dengan tujuan agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan tenaga professional.

Semakin besar perusahaan dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan hanya bertugas mengawasi dan memonitori jalannya perusahaan. Pihak manajemenlah yang memastikan bahwa staf dan karyawannya bekerja dengan baik. Walaupun begitu, pemisahan ini juga memberikan dampak negatif yaitu adanya peluang dari manajemen dalam mengoptimalkan laba agar mengarah pada kesejahteraan pengelola manajemen.

Pemisahaan seperti ini menimbulkan potensi ketidak keterbukaan saat menggunakan dana pada perusahaan. Untuk meminimalisir penyimpangan tersebut maka perusahaan tidak hanya melaporkan secara rutin namun juga melaporkan dengan memenuhi syarat GCG yaitu transparasi, akuntabilitas, responsibilitas, independesi, kesetaraan dan kewajaran.

2. Tentang Good Corporate Governance

Good Corporate Gorvance (GCG) diartikan sebagai suatu sistem atau struktur yang dipakai oleh anggota perusahaan baik itu pemegang saham atau pemilik modal bisa juga komisaris atau dewan pengawas dan direksi. Digunakan untuk meningkatkan keberhasilan dan akutanbilitas perusahaan agar mewujudkan manfaat bagi pemegang saham baik dalam jangka panjang dan tetap mawas denga kepentingan *stakeholder*.

Sedangkan dari sudut pandang Cadbury. ia mengatakan bahwa *good corporate govenrcane* lebih kepada mengarahkan dan mengendalikan jalannya suatu perusahaan agar tercapai keseimbangan. Dan juga agar bisa tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Adapun definisi lainnya, dikemukakan oleh *center for europan policy study* (CEPS), CGC yaitu sebuah sistem yang dibentuk dari hak , proses dan pengendalian di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sehingga GCG tercipta demi tujuan yang baik yaitu keseimbangan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

laksanaan asaa GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

3. Struktur Good corporate governance

Berikut adalah struktur *governance* atau organ dalam perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris memiliki beberapa fungsi namun yang paling utama adalah melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan efektif dan melaporkan pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Para dewan komisaris semestinya berlaku secara transparan. Ukuran dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengutamakan kepentingan saham pendiri dan memastikan perusahaan melakukan kegiatannya (Adrian, 2011).

2) Dewan komisaris independen

Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan baik hubungan keluarga, personal, atau ikatan hubungan saudara. Sehingga dewan komisaris independen hadir berdasarkan keahlian dan profesionalitas mereka atau bisa juga karena kepemilikan saham yang besar dari mereka.

3) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana seorang manajer atau seorang yang bertugas menajalankan perusahaan seperti direktur juga memiliki saham dalam perusahaan. Memiliki bagian dalam perusahaan. Sehingga keuntungan perusahaan juga menjadi bagian keuntungan manajer bukan hanya gaji manajer atau direktur.

4. Corporate sosial responsity (CSR)

Corporate sosial responsibility menurut Suhandari M. putri, pada buku corporate sosial responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan dan

menitik berat pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Corporate sosial responsibility (CSR) sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin. CSR memberikan harapan besar kepada kemajuan kesejahteraan masyarakat. Walaupun begitu, CSR nampaknya belum optimal dalam memberikan kontribusi yang signifikan. Hal ini terlihat dari studi yang pernah dilakukan. Dalam beberapa studi tersebut terlihat bahwa program CSR masih sebatas realisasi kegiatan sedekah dan berbagi dimana itu belum mampu memberdayakan masyarakat miskin. Keterbatasan manfaat ini bisa jadi juga karena niat dari program CSR yang salah satunya untuk menghindari konflik dengan masyarakat dan arena program tersebut. Sehingga lebih sering CSR untuk menarik simpati dan hati dari masyarakat dibandingkan pemberdayaan.

Keberadaan suatu usaha idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Selain memberdayakan masyarakat, dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak baik, bisa dipastikan ada masalah. Selain itu, CSR memiliki manfaat yaitu dapat mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan; mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial; mereduksi risiko bisnis peusahaan; memperbaiki hubungan dengan stakeholders; memperbaiki hubungan dengan regulator; meningkatkan semangat dan produktivtas karyawan dan peluang mendapatkan penghargaan.

5. Profitabilitas

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya (Syafri, 2008:304).

Return on asset (ROA) yaitu dengan cara mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan mengangkat good corporate governance dan corporate sosial responsibility sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitan yang dilakukan oleh Nike Nur Aini dan Nur Cahyawati (2011) pada perusahaan non keuangan yang terdaftar I bursa efek Indonesia menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility. Independensi komite audit tidak berpengaruh positif terhadapn pengungkapan corporate sosial responsibility. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap corporate sosial responsibility. Kepemilikan institutional berpengaruh terhadap corporate sosial responsibility. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap corporate sosial

responsibility. Kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap corporate sosial responsibility. Ukuran perusahaan (size) berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility.

Penelitian yang lakukan oleh Marfuah dan Yuliawan Dwi Cahyono (2011) tentang karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki hasil bahwa size perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhaap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profil perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap corporate sosial responsibility. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap corporate sosial responsibility. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap corporate sosial responsibility. Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap corporate sosial responsibility. Rasio efisiensi operasi tidak berpengaruh terhadap corporate sosial responsibility.

Penelitian oleh Rita Yuliana, Bambang Purnomosidhi dan Eko Ganis Sukoharsono (2008) tentang pengaruh karateristik perusahaan terhadap pengungkapan corporate sosial responsibility dan dampaknya terhadap reaksi investor. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap keluasaan pengungkapan corporate sosial responsibility. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan corporate sosial responsibility. Profil perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat keluasan pengungkapan corporate sosial responsibility. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap keluasan pengungkapan corporate sosial

responsibility. Konsentrasi kepemilikan berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan corporate sosial responsibility. Keluasan pengungkapan corporate sosial responsibility berpengaruh terhadap reaksi investor.

C. Hipotesis

Salah satu dari asas *good governance* adalah *responsibility* dimana di dalam *responsibility* adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab untuk masyarakat adalah *corporate sosial responsibility*. Berikut adalah hipotesis pada penelitian ini.

Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia.

Dewan komisaris atau dikenal *board of director* di dunia barat memiliki banyak sekali fungsi pengawasan utama, salah satu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan *corporate governance* pada suatu perusahaan. Pengawasan yang dimaksud juga termasuk dalam mengawasi keterbukaan dan komunikasi. Sehingga semakin besar jumlah ukuran dewan komisiaris maka akan semakin besar pula pengawasan terhadap CEO dan manajer. Semakin besar pengawasan dan tekanan dari dewan komisiaris membuat keterbukaan dan transparansi informasi dan salah satunya melakukan pengungkapan CSR.

Senada dengan ini penelitian yang dilakukan oleh Nike (2011) pada penelitian sebelumnya menunjukan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliawan dan Marfiah (2011) membuktikan adanya pengaruh ukuran dewan

komisiaris terhadap pengungkapan CSR. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh sembiring (2005), sabeni (2002), coller dan Gregory (1999) terbukti ukuran dewan komisiaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia.

2. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia

Dewan komisaris independen dalam proporsi dewan komisaris disebuah perusahaan memberikan pengaruh dalam pandangan pengawasan perusahaan karena dewan komisiaris independen tidak memiliki ikatan baik keluarga atau personal sehingga mendorong pandangan lebih objektif dan tidak memihak. Adanya dewan komisaris independen pada suatu perusahaan mendorong adanya informasi yang lebih terbuka atau transparan kepada jajaran dewan komisiaris termasuk informasi pengungkapan CSR. Dewan komisaris independen juga melakukan pertanggungjawaban atas pengawasan perseroan. Selain itu juga melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Sehingga pengawasan atau tugas dewan komisaris independen yang tidak ada ikatan keluarga dapat mendorong pengkungkapan CSR dan transparansi.

Sejalan dengan hal ini penelitian sebelumnya dilakukan oleh Said et al (2009), Rosenstein dan Watt (1990) membuktikan adanya pengaruh dewan komisiaris independen terhadap pengungkapan CSR.

H2: proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia.

Menurut teori keagenan, permasalahan muncul ketika manajer tidak memiliki kepemilikan terhadap perusahaan. Sehingga muncul penyimpangan akibat keinginan pemanfaatan individual. Maka ketika manajer memiliki kepemilikan terhadap perusahaan akan mengurangi penyimpangan tersebut. Namun karena manajemer di perusahaan terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk melakukan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan dan juga investasi berupa kepemilikan saham di perusahaan maka akan terjadi kebebasan oleh manajemen dalam mengungkapankan tanggungjawab sosial perushaan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Hal ini sejalan dengan sebuah teori yaitu teori institusional dimana teori ini menyatakan bahwa suatu terbentuknya organisasi disebabkan adanya tekanan lingkungan institusional. Regulasi yang mengikat pelaksanaan kegiataan seperti regulasi untuk pengungkapan tanggungjawab sosial yaitu UU No. 40 Tahun 2007 dan regulasi untuk struktur kepemilikan adalah good corporate governance berdampak pada tekanan terhadap pihak manajerial untuk melakukan pengungkapkan sedangkan luas pengungkapan itu sendiri berbanding terbalik atau memberikan arah negatife.

Senada dengan hal ini telah dilakukan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspitaningrum et al. (2012), Ghazali (2007), Oktavia et al. (2014).

H3 : kepemilikan manajerial berpengaruh negative terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia.

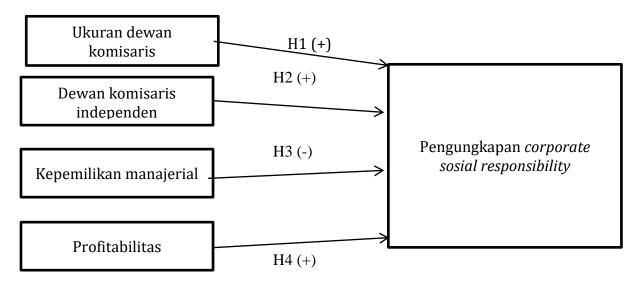
4. Profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di indoensia.

Profitabilitas berkaitan dengan kemampuan sebuah perusahan memperoleh laba. Apabila laba perusahaan tinggi maka menunjukan ketercukupan dana untuk dapat melakukan CSR dan pengungkapan CSR. Sehingga profitabilitas sebuah perusahaan berpengaruh kepada keberlangsungan CSR dan pengungkapan CSR. Laba yang tinggi menunjukan ketersediaan dana untuk melakukan CSR dan pengungkapannya. Sehingga besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan CSR dan pengungkapan CSR. Adanya profitabilitas tinggi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sejalan dengan teori *signaling hyphotesis* yang menyatakan bahwa perusahaan yang unggul dan mempunyai laba yang baik akan mengungkapkan informasi lebih rinci.

Senada dengan hal ini penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh Rashid dan Ibrahim (2002), O'Dwyer (2003), Juholin (2004), Roar (2004), Sembiring (2005), Baron (2005), Anggaraini (2006), Hackston dan Minell (1996) mendapatkan hasil positif dan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

H4: profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR di Indonesia

3. Model penelitian



Gambar 2.1 model penelitian